

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi antar bangsa dan negara baik berupa kerjasama maupun konflik. Setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain guna melengkapi baik kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hingga kini hubungan internasional telah berubah yang awalnya hanya kerjasama dalam bidang militer dan persenjataan namun telah meluas ke bidang lain yakni dalam bidang ekonomi, budaya dan bahkan pengaruh ideologi.

Setiap negara pasti merasa terancam dengan negara-negara tetangga yang terus mengembangkan usaha militer mereka baik berupa pelatihan pasukan militer maupun pengembangan persenjataan yang sangat berbahaya. Maka dari itu, negara perlu bekerjasama dengan negara lain untuk membentuk strategi dalam membendung suatu negara yang dapat dianggap sebagai ancaman. Strategi kerjasama tersebut dapat berupa pengembangan pertahanan di wilayah negara serta melakukan usaha negosiasi untuk menghindari terjadinya peperangan.

Dalam memperkuat pertahanan negara, maka negara memiliki kewajiban membangun pangkalan atau markas militer di wilayah yang strategis. Pangkalan militer merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai tempat pelatihan dan badan operasi bagi pasukan militer, serta sebagai tempat penyimpanan persenjataan. Dengan kata lain, Komponen dari pangkalan militer dapat meliputi Tempat Operasi Pasukan Militer, Kamp militer, Pangkalan Udara, Markas Korps Marinir, Lapangan Terbang, Pos Pengintaian, Gudang Senjata dan sebagainya. Dengan menempatkan pasukan militer dan angkatan bersenjata di wilayah yang strategis, maka negara memiliki keuntungan dan peluang yang tinggi dalam menghadapi berbagai ancaman bersenjata.

Namun, perlu diketahui bahwa ada suatu situasi dimana pengembangan sektor pertahanan dapat berdampak buruk bagi pihak domestik baik dalam kehidupan sosial maupun kesehatan. Di lain waktu, kebijakan negara yang lebih terfokus dalam

mengembangkan sektor pertahanan mereka dari ancaman negara lain biasanya tidak meminta atau mengabaikan pendapat dan persetujuan dari pihak domestik.

Perang Dunia Kedua telah memberikan kesadaran secara menyeluruh bagi negara dan bangsa bahwa peperangan hanya akan merugikan negara dan bangsa itu sendiri dari baik segala sektor maupun nyawa masyarakat di seluruh dunia. Sehingga kerjasama internasional di seluruh dunia semakin diperkuat untuk memenuhi kepentingan masing-masing bangsa dan negara. Kerjasama internasional juga dapat mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang serta mewujudkan perdamaian. Salah satu contoh kerjasama antar negara tersebut adalah Amerika dan Jepang.

Hubungan kerjasama keamanan antara Amerika dan Jepang dilatarbelakangi oleh ketergantungan Jepang dengan pasukan militer Amerika yang ditempatkan di wilayah Jepang untuk memperkuat keamanan regional Jepang serta mewujudkan perdamaian. Berakhirnya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan kekalahan Jepang telah mempersulit Jepang dalam membangun kembali pertahanan dan keamanan negara tersebut yang sebagian besar pengeluaran anggaran militernya dihabiskan untuk usaha strategi penaklukan Asia Pasifik. Maka pada masa Perang Dingin, Jepang bekerjasama dengan Amerika, mantan musuhnya pada masa Perang Dunia Kedua, untuk meminta bantuan kekuatan militer Amerika dalam membangun kembali pertahanan dan keamanan di wilayah Jepang. Kerjasama tersebut dapat menghapus permusuhan dan memperbaiki hubungan antara kedua negara tersebut akibat Perang Dunia Kedua serta bisa mengawali dan menjalin hubungan kerjasama bilateral antara Amerika dan Jepang yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing baik dalam sektor Ekonomi Politik maupun militer.

Jepang melakukan perjanjian keamanan dengan Amerika untuk pertama kalinya dalam *United States-Japan Security Treaty* yang ditandatangani pada tahun 1951 di San Fransisco (*Treaty of San Fransisco*) dan mulai berlaku pada tahun 1952. Isi dari Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Amerika memiliki wewenang dalam menempatkan pasukan dan pangkalan militer di Jepang untuk keamanan regional terhadap serangan militer eksternal serta munculnya kerusuhan internal. Namun, pada masa berlakunya traktat tersebut, Pemerintah Amerika tidak memberikan komitmen

yang spesifik dalam melindungi Jepang dan memiliki hak dalam mengoperasikan pasukannya di Asia Timur (Packard, 2010:93).

Kemudian, perjanjian tersebut direvisi kembali dalam perjanjian *United States-Japan Mutual Cooperation and Security Treaty* pada tahun 1960 untuk meminta persetujuan Jepang dalam menempatkan USFJ (*United States Forces Japan*) di Tokyo yang kemungkinan besar memiliki hak veto, serta menambahkan kewajiban pertahanan timbal balik Amerika dan Jepang. Berdasarkan perjanjian *Mutual Cooperation and Security Treaty*, Amerika berhak untuk mempertahankan Jepang dari ancaman serangan eksternal, namun Jepang tidak berkewajiban untuk membela Amerika bila diserang. Sebagai gantinya, Jepang terus memperluas dan mengembangkan JSDF (*Japan Self-Defence Forces*) serta menyumbangkan lebih banyak biaya untuk menampung kehadiran militer Amerika di wilayah Jepang (*Host Nation Support/HNS*) (Clanlett-Avery, 2016:28). Untuk mendukung pasukan Amerika di Jepang, maka pemerintah Jepang meningkatkan dukungan hingga sekitar tiga perempat dari seluruh biaya penempatan Amerika di wilayah Jepang (Oshima, 1992:61).

Berkat *Mutual Cooperation and Security Treaty* Jepang dan Amerika, Amerika memiliki hak dan kewenangan dalam mendirikan pangkalan militer di wilayah kedaulatan Jepang untuk membawa misi perdamaian dalam meredakan konflik di Asia Pasifik. Amerika juga cenderung berencana untuk mengembangkan keamanan dan pertahanan di berbagai kawasan dunia demi mendominasi dunia politik internasional. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu komponen utama dalam mewujudkan kepentingan Amerika tersebut. Ketergantungan Jepang terhadap kemiliteran Amerika dimanfaatkan oleh Amerika dalam mencapai kepentingan keamanan tersebut.

Okinawa menjadi salah satu titik fokus utama Amerika dalam perencanaan pembangunan pangkalan militer di wilayah Jepang mengingat letak geografis yang sangat strategis. Alasan Amerika dalam membangun markas kemiliteran di Kepulauan Okinawa adalah dikarenakan letak geografisnya sangat strategis sehingga dapat disebut sebagai jalur utama perdagangan internasional yang menjadi rute pintas dari Tokyo. Penempatan pangkalan militer tersebut juga menjadi titik utama dalam memperkuat pengaruhnya di Asia Timur baik dalam bidang politik maupun sosial. Markas militer dan pos pengintaian Amerika di Okinawa menjadi salah satu komponen yang paling

penting dari kebijakan keamanan Amerika di Asia Pasifik, serta mempererat kerjasama keamanan Jepang dan Amerika yang membentuk aliansi militer. Kepulauan Okinawa telah menjadi pusat pangkalan militer Amerika di wilayah Jepang, serta sebagai pos pengintaian dengan jangkauan daerah pengintaian yang sangat luas.

Pemerintah Amerika dan Jepang melakukan manuver untuk menstabilkan dan memperkuat aliansi Jepang dan Amerika dengan membuat Okinawa menanggung beban berat yang tidak proporsional untuk menampung kehadiran militer AS (Moriteru, 2001:103). Hampir sekitar 75% dari seluruh pasukan militer Amerika di wilayah kedaulatan Jepang, ditempatkan di Okinawa. Berdasarkan fakta Geografisnya, Okinawa mewakili 0,6% dari seluruh daratan Jepang (Moriteru, 2001:102). Keberadaan markas militer Amerika tersebut telah menjadi tempat tinggal bagi pasukan militer Amerika yang mendirikan perumahan di wilayah tersebut. Kepala Biro Tokyo bernama Martin Fackler menjelaskan bahwa Okinawa menjadi tuan rumah bagi dua pertiga dari 37.000 personel militer Amerika Serikat yang berbasis di Jepang (Fackler, 2012). Mereka menempati sekitar 18% dari keseluruhan wilayah daratan di pulau utama Okinawa dan menempati sekitar 10% dari keseluruhan wilayah prefektur Okinawa.

Pangkalan Militer Amerika di Okinawa tersebut sebagian besar terdiri dari Markas Takae, Kadena, Hansen, Torii, Schwab, Foster, Kinser, Gonsalvez hingga Futenma. Markas militer tersebut menjadi salah satu tempat operasi, pelatihan serta ruang gerak USFJ Amerika di Samudera Pasifik. Sedangkan beberapa pangkalan militer lainnya dijadikan sebagai pos pengintaian.

Pada masa sebelum Pangkalan militer ditempatkan di Okinawa, Masyarakat Jepang belum memiliki pandangan perspektif baik positif maupun negatif terhadap perencanaan Amerika dan Jepang dalam menempatkan Pangkalan militer di Okinawa. Hal ini dikarenakan Masyarakat Jepang tidak terlalu mepedulikan kehadiran militer Amerika di Okinawa tersebut, yang dianggapnya tidak begitu melibatkan kehidupan Domestik Jepang. Kemudian, setelah Pangkalan militer tersebut ditempatkan di Okinawa, Masyarakat Jepang mulai memiliki berbagai pandangan perspektif setelah merasakan pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari pangkalan militer tersebut terhadap kehidupan Domestik di sekitarnya.

Keberadaan Markas dan pasukan militer Amerika telah memberikan dampak buruk terhadap pusat kehidupan sosial masyarakat di Okinawa. Pasukan militer Amerika melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup masyarakat seperti membersihkan kota dan desa, menguasai ladang, pantai, pelabuhan, dan muatan udara di atas tanah. Hal ini ditujukan untuk memperluas wilayah sebagai tempat pelatihan pasukan militer Amerika. Tindakan ini mengganggu kehidupan sehari-harinya dan tindakan masyarakat yang tinggal di Okinawa. Perumahan penduduk lokal juga terganggu oleh keberadaan tentara Amerika yang mulai mendirikan perumahan baru di Okinawa sebagai tempat tinggal barunya, sehingga mulai merusak kehidupan rumah tangga penduduk lokal. Tidak hanya itu, terdapat subsidi besar Jepang untuk fasilitas militer Amerika dan proyek prefektur serta gaji untuk pekerja pokok dan pembayaran kepada pemilik tanah untuk properti yang disewakan ke markas (McCormack, 1998). Keberadaan pangkalan militer tersebut sering menimbulkan keresahan pada masyarakat setempat. Terlebih lagi, Identitas masyarakat setempat tidak begitu dihargai oleh Tentara Militer Amerika Serikat dan sering menimbulkan diskriminasi. Bahkan Kehidupan Hak Wanita sangat tidak dihargai.

Pada bulan September tahun 1995 tiga tentara Amerika menyerang dan memperkosa seorang anak perempuan berusia dua belas tahun di kota Kin di Okinawa. Para pelaku tersebut menjalani hukuman penjara dalam waktu enam setengah sampai tujuh tahun penjara di bangunan tahanan militer Amerika khusus di Yokosuka, provinsi Kanto (Reid, 1998:19). Insiden tersebut telah menimbulkan keresahan dalam hubungan kerjasama keamanan antara Amerika dan Jepang.

Insiden pemerkosaan yang terjadi pada tahun 1995 telah mendorong masyarakat melakukan mobilisasi dalam melakukan perlawanan terhadap keberadaan pangkalan militer Amerika. Sekitar pada tahun 1997 Penduduk lokal Okinawa membentuk koalisi untuk memaksa Amerika memindahkan pangkalan tersebut. Terdapat berbagai macam Koalisi untuk melakukan oposisi seperti Hantaikyo, Juku No Kai, Janu No Kai dan lainnya. Mobilisasi kelompok masyarakat anti markas militer muncul di bagian utara dan selatan Okinawa, terutama di Kota Nago dan Futenma. Timbulnya pergerakan masyarakat terhadap keberadaan pangkalan militer Amerika di Okinawa yang didorong oleh insiden pemerkosaan tahun 1995 membuat pemerintah Jepang turun tangan untuk

meminta penyelesaian dengan kedutaan Jepang agar meminta pemerintah Amerika untuk melakukan pemindahan pangkalan tersebut di Okinawa, terutama pemindahan Stasiun Udara Korps Marinir Futenma.

Jepang telah menyusun berbagai rencana yang alternatif dalam relokasi Stasiun Udara Korps Marinir Futenma di wilayah tertentu seperti pulau Guam, Henoko dan bahkan Hawaii. Akan tetapi, usaha diplomasi Jepang mendapat kesulitan dalam melakukan kesepakatannya dengan Amerika. Amerika secara terus-menerus menunda kesepakatan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perencanaan Jepang dalam relokasi pangkalan militer dan pos pengintaian Amerika di Jepang sering menemui jalan buntu. Amerika selalu mencari cara dalam mensiasati kedudukan militernya di Okinawa. Meskipun demikian, pemerintah Jepang memutuskan agar tetap bertahan dalam menghadapi krisis dalam perencanaan relokasi tersebut, memandang bahwa pasukan militer Amerika sebagai satu-satunya komponen yang dibutuhkan dalam memperkuat keamanan regional di wilayah Jepang. Sementara perencanaan relokasi tersebut masih berlangsung, pembangunan markas militer baru di Okinawa masih terus dilakukan secara perlahan.

Pada tahun 2006, Pemerintah Jepang dan Amerika melakukan perjanjian baru untuk memindahkan markas militer Futenma ke Selat Henoko di Okinawa Utara, dengan penandatanganan dokumen perjanjian yang disebut sebagai *United States–Japan Roadmap for Realignment Implementation*. Amerika Serikat juga menyetujui sebuah relokasi tentara marinir ke pulau Guam, serta mempertimbangkan dalam memindahkan sebagian fasilitas pangkalan militer Futenma ke Pangkalan Udara Iwakuni, Prefektur Yamaguchi. Pemerintah Amerika juga mempertimbangkan untuk menutup Pelabuhan militer Naha, *Camp Kinser*, *Camp Lester*, dan *Camp Foster*, serta memindahkan sebagian komando utama marinir Amerika ke Pulau Guam (Shinoda, 2014:52).

Perdana Menteri Jepang bernama Yukio Hatoyama mengeluarkan janjinya pada tahun 2009, bahwa beliau berjanji akan memindahkan markas militer Amerika dari Okinawa. Namun, sumpah tersebut tidak dapat dipenuhi setelah usaha beliau dalam melakukan diplomasi dengan Amerika mengenai pernyataan tersebut mendapat kegagalan. Sehingga Yukio Hatoyama mengundurkan dirinya sebagai Perdana Menteri Jepang setelah sekitar sepuluh bulan (September 2009-Juni 2010) beliau memegang

jabatan tersebut akibat pernyataan sumpahnya yang dapat dinyatakan kepalsuan. Sehingga Jepang kembali mengalami kesulitan dalam perencanaan relokasi pangkalan militer tersebut.

Kemudian pada tahun 2012, Amerika menempatkan pesawat terbang militer MV-22 Osprey ke pangkalan militer Amerika di Ginowa, Okinawa demi memperkuat kedudukan pertahanan dan keamanan Amerika di wilayah Asia Pasifik. Penempatan pesawat Osprey tersebut tentunya mengkhawatirkan para pejabat politik Jepang serta masyarakat lokal Okinawa karena melihat pesawat Osprey tersebut seringkali mengalami kecelakaan di beberapa wilayah seperti di Florida dan Afrika. Sehingga masyarakat lokal Okinawa melakukan demonstrasi memprotes penempatan Pesawat militer Osprey di Ginowa. Sekitar 25.000 orang yang ikut serta dalam aksi demonstrasi anti Osprey tersebut. Demonstrasi anti Osprey tersebut menjadi salah satu protes anti militer Amerika di Okinawa yang terbesar pada masa itu (Tritten, Sumida, 2012).

Kehadiran pasukan militer Amerika di Okinawa telah memunculkan berbagai pandangan di kalangan domestik Jepang. Sebagian besar aktor domestik berpandangan bahwa keberadaan pasukan militer di Okinawa akan menghancurkan kehidupan masyarakat lokal Okinawa dalam bidang apapun, sehingga akan timbul rasa ketidakpercayaan dalam diri masyarakat yang berasumsi mengenai ketidakpedulian pemerintah Jepang terhadap kehidupan masyarakat. Namun, sebagian aktor domestik lainnya berpandangan bahwa penempatan pasukan militer di Okinawa dibutuhkan dalam strategi pertahanan menghadapi ancaman di Asia Pasifik. Perbedaan pandangan di kalangan domestik Jepang tersebut inilah yang menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi kerjasama Amerika dan Jepang dalam merelokasikan pangkalan militer di Okinawa.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis akan membahas Kerjasama militer Amerika dan Jepang dalam merencanakan relokasi penempatan pangkalan militer Amerika di Okinawa pada periode 2012 hingga 2016 yang berdasarkan perspektif Jepang. Berdasarkan periode tersebut, penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi dari perjanjian kerjasama Jepang dan Amerika baik berupa traktat maupun kesepakatan terkait isu tersebut yang telah berlangsung terakhir kali dibahas dan dicantumkan pada tahun 2012 hingga 2016 semenjak munculnya perjanjian *United*

States–Japan Roadmap for Realignment Implementation pada tahun 2006. Penulis juga akan membahas pentingnya nilai strategis di Okinawa dalam pertahanan di Asia Pasifik. Kemudian, penulis juga akan membahas bagaimana pandangan faktor domestik Jepang terhadap kehadiran militer Amerika dan Jepang serta usaha faktor domestik Jepang dalam mempengaruhi proses kerjasama Jepang dan Amerika terkait pangkalan militer Amerika di Okinawa yang berlangsung pada periode 2012 hingga 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana kerjasama Amerika dan Jepang dalam relokasi pangkalan militer Amerika di Okinawa Periode 2012-2018?*”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan proses kerjasama Amerika dan Jepang dalam relokasi pangkalan militer Amerika di Okinawa.
2. Untuk mengetahui nilai strategis yang terkandung dalam pangkalan militer di Okinawa yang merupakan hasil dari kerjasama pertahanan Amerika dan Jepang di Asia Pasifik.
3. Untuk menjelaskan bagaimana faktor domestik Jepang terlibat dalam dinamika proses kerjasama Jepang dan Amerika dalam relokasi pangkalan militer Amerika di Okinawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis, Untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dan pembahasan baik penulis maupun pembaca.
2. Secara Akademis, Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa dan mahasiswi mengenai Pembentukan kerjasama militer Amerika dan Jepang di kawasan Asia Pasifik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 (Lima) Bab yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisannya menyusun penelitian ini. Dengan Bab ini, maka penulis dapat memberikan penjelasan bagaimana latar belakang terjadinya permasalahan yang dapat memberikan potensi penulis dalam menyusun dan melakukan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan bagaimana Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Alur Pemikiran dan Asumsi dalam menyusun Penelitian ini. Dengan Bab ini, maka penulis dapat memberikan arahan dan gambaran penelitian yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Tempat Penelitian.

Bab IV Kerjasama Amerika dan Jepang Dalam Relokasi Pangkalan Militer Amerika di Okinawa

Pada Bab ini akan menjelaskan kerjasama Amerika dan Jepang dalam relokasi pangkalan dan pasukan militer Amerika di Kepulauan Okinawa. Bab ini juga akan menjelaskan bagaimana pentingnya nilai strategis yang terkandung dalam menempatkan pangkalan dan pasukan militer Amerika di Okinawa sebagai hasil dari kerjasama Amerika dan Jepang.

Bab V Dinamika Politik Domestik Jepang Dalam Proses Relokasi Pangkalan Militer Amerika di Okinawa

Bab ini akan menjelaskan bagaimana faktor politik domestik Jepang mempengaruhi dan menanggapi kerjasama Amerika dan Jepang terkait proses perencanaan relokasi markas militer di Okinawa yang diikuti oleh dampak dan pandangan bagi pihak domestik Jepang.

Bab VI Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan serta saran penulis dari penelitian ini serta sebagai bab penyelesaian pembahasan penelitian.

